

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Pati dan Jepara)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

HANA PRADANI

B 200100076

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Pati dan Jepara).**

Yang ditulis oleh :

HANA PRADANI

B 200 100 076

Penandatanganan berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Februari 2014

Co. Pembimbing

Pembimbing



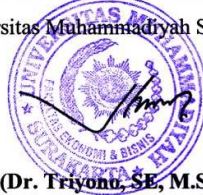
(Eny Kusumawati, SE, Ak)



(Banu Witono, SE, Ak, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Pati dan Jepara).**

HANA PRADANI
B 200100076

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: pradani_hana@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dengan menggunakan data primer, mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Sampel yang digunakan adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pati dan Jepara. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 orang.

Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan korelasi *product moment*, sedangkan reliabilitasnya di uji *crobackt alpha*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linier berganda, uji F, uji R^2 dan uji t. Semua data yang diperoleh sudah memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteros-kedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian statistik, menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara statistik signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, serta interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci: *Pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan keuangan daerah (APBD).*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan, serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Dan salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia.

UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hal tersebut sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti: APBD, hubungan legislatif, dan eksekutif di daerah (Ritonga, 2009). Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota).

Dalam hal ini, dewan menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai anggota dewan. Hal tersebut disebabkan karena anggota dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi yang kuat. Sikap ketidakpercayaan inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan dewan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD), serta apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

serta menganalisis komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut pasal 1 ayat (5) PP. No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu: masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32/2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta kerjasama internasional di daerah.

C. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Sopanah et al, 2007).

D. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Pramita dan Andriyani, 2010).

E. Akuntabilitas

Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban. Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh, 2008).

F. Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin et al, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan (Hopwood, 1994 dalam Zainuddin et al, 2002).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap anggota DPRD Kabupaten Pati dan Jepara periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, penulisan serta laporan pertanggung jawaban, juga menganalisa tingkat pengawasan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, dan seberapa besar pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang berperan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Data dari penelitian ini adalah data primer dari kuesioner serta jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris dan kuisisioner pada pihak/instansi terkait guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati dan Jepara Periode 2009-2014, yang berjumlah 90 orang anggota yang terdiri dari empat komisi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel

jenuh, metode sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2004).

C. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Variabel

Penelitian ini terdiri dari lima variabel meliputi: (a) variabel independen: pengetahuan dewan tentang anggaran, (b) variabel dependen: pengawasan keuangan daerah, (c) variabel moderating: komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

a. Pengetahuan Dewan tentang anggaran

Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Aristanti dan Pujirahayu, 2012). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Anggaran ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

b. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan yang diperlukan pada setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah yang digunakan (Pramita dan Andriyani, 2010).

c. Komitmen organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Pramita dan Andriyani, 2010). Menurut Feris dan Aranya (1987) dalam Pramita dan Andriyani (2010) indikator-indikator komitmen organisasi menyangkut tiga sikap, yaitu: rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, rasa kesetiaan pada organisasi.

d. Akuntabilitas

Pengetahuan dewan tentang standar operasional prosedur akuntabilitas, manfaat LAKIP untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, pengetahuan dewan tentang prinsip penyusunan LAKIP dan pengetahuan dewan tentang mekanisme penyampaian LAKIP (Pramita dan Andriyani, 2010). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas ini mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

e. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, kritik terhadap prioritas dan rencana APBD, serta pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD (Pramita dan Andriyani, 2010). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

2. Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert. Skala likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada (Sugiyono, 2004: 37). Hasil jawaban di setiap *item instrument* yang menggunakan skala likert, akan mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negatif, dengan interval skor yang digunakan dalam skala likert penelitian ini adalah:

- a. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
- b. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2
- c. Jawaban Tidak Tahu diberi skor 3
- d. Jawaban Setuju diberi skor 4
- e. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5

D. Metode Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengolahan data, guna memperoleh kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrument penelitian ini maka terlebih dahulu dilakukan *validity and reliability test* atas data tersebut.

1. Uji Validitas (Keshahihan)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005:45). Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai signifikansi dari pengujian *product moment* $< 0,05$, maka data valid.
- b) Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari pengujian *kolmogorof-smirnof*, maka data valid.

2. Uji reliabilitas

Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau andal, jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005: 41). Untuk mengukur reliabilitas dengan uji *statistic cronbach alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ (Ghozali, 2005: 42).

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda yang sebelumnya harus terbebas dari pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas).

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi yang mengansumsikan bahwa setiap residual didistribusikan secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji *kolmogorov-smirnov* dengan melihat nilai *asym.sig* $> 0,05$ (Ghozali, 2005: 110).

b. Uji multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan pengujian untuk menentukan apakah pada model regresi ditemukan adanya masalah di antara variabel independen. Batas dari *tolerance value* adalah 0,10 dan batas *VIF* adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan hasil *VIF* di bawah nilai 10 dan *tolerance value* di atas 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2005: 92).

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel *coefficients* apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 105).

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun dari analisis linier berganda dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$APBD = \alpha + \beta_1 PDDTA + e \dots \dots \dots (1)$$

$$APBD = \alpha + \beta_1 PDDTA + \beta_2 KO + \beta_3 PDDTA \times KO + e \dots \dots \dots (2)$$

$$APBD = \alpha + \beta_1 PDDTA + \beta_4 AK + \beta_5 PDDTA \times AK + e \dots \dots \dots (3)$$

$$APBD = \alpha + \beta_1 PDDTA + \beta_6 PM + \beta_7 PDDTA \times PM + e \dots \dots \dots (4)$$

b. Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

2) Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

3) Uji t

Distribusi t untuk menguji suatu hipotesis. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

A. Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif hasil pengolahan data SPSS 17.0:

DESKRIPSI STATISTIK					
Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	33	49	75	62.61	6.359
Komitmen Organisasi	33	16	29	23.48	3.874
Akuntabilitas	33	21	35	27.73	3.291
Partisipasi Masyarakat	33	22	35	28.30	3.036
Pengawasan Keuangan Daerah	33	38	65	51.61	6.791
Valid N (listwise)	33				

B. Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 17.0, data dalam penelitian ini telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengujian hipotesis 1

$$APBD = \alpha + \beta_1 PD + e \dots\dots\dots (1)$$

HASIL ANALISIS REGRESI MODEL PERTAMA

Variabel	Koef. Regresi	t _{hitung}	Prob.
Konstanta	7,145		
Pengetahuan Dewan	0,710	4,957	0,000
R ²	0,442		
Adj. R ²	0,424		
F hitung	24,571		
Prob. F	0,000		

2. Pengujian hipotesis 2

$$APBD = \alpha + \beta_1 PDTA + \beta_2 KO + \beta_3 PDTA \times KO + e \dots\dots\dots (2)$$

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER MODEL KEDUA

Variabel	Koef. Regresi	t _{hitung}	Prob.
Konstanta	4,006		
Pengetahuan Dewan	0,840	3,438	0,002
Komitmen Organisasi (KO)	0,178	0,270	0,789
Interaksi PDTAKO	-0,006	-0,712	0,482
R ²	0,473		
Adj. R ²	0,419		
F hitung	8,688		
Prob. F	0,000		

3. Pengujian hipotesis 3

$$APBD = \alpha + \beta_1 PDTA + \beta_4 AK + \beta_5 PDTA \times AK + e \dots\dots\dots (3)$$

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER MODEL KETIGA

Variabel	Koef. Regresi	t _{hitung}	Prob.
Konstanta	42,139		
Pengetahuan Dewan	0,027	0,105	0,917
Akuntabilitas (AK)	-1,484	2,414	0,022
Interaksi PDTAAK	0,028	3,043	0,005
R ²	0,586		

Adj. R ²	0,544
F hitung	13,705
Prob. F	0,000

4. Pengujian hipotesis 4

$$APBD = \alpha + \beta_1PDTA + \beta_6PM + \beta_7 PDTAxPM + e.....(4)$$

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER MODEL KEEMPAT

Variabel	Koef. Regresi	t _{hitung}	Prob.
Konstanta	59,533		
Pengetahuan Dewan	0,009	0,034	0,973
Partisipasi Masyarakat (PM)	-2,021	-3,426	0,002
Interaksi PDPM	0,027	3,081	0,004
R ²	0,603		
Adj. R ²	0,562		
F hitung	14,677		
Prob. F	0,000		

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} pada variabel pengetahuan dewan lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,957 > 2,048) dan signifikansi kurang dari 5% (0,000 < 0,05), maka H₀ ditolak dan H_a diterima.
2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (-0,712 < 2,048) dengan signifikansi lebih dari 5% (0,482 > 0,05), maka H₀ diterima berarti H_a ditolak
3. Akuntabilitas berpengaruh secara statistik signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,043 > 2,048) dengan signifikansi lebih kecil dari 5% (0,005 < 0,05), maka H₀ ditolak berarti H_a diterima
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara statistik signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,081 > 2,048)

dengan signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,004 < 0,05$), maka H_0 ditolak berarti H_a diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diberikan saran-saran untuk peneliti berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian, maupun obyek penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih representative atau digeneralisasi untuk penelitian lain.
2. Menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung kepada anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga jawaban responden dapat dikontrol dan tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrument penelitian yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Darma, Jufri dan Ali Fikri, H. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Mediasi*, Vol. 4 No.1 Juni 2012.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mardiasmo. 2001. *Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Penerbit Andy. Yogyakarta.
- Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Universitas Tridinanti Palembang. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 2, No. 1.
- Novietta, liza. 2010. Pengaruh partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan eksekutif tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah : STIE Harapan Medan, Vol.2, No.1, maret 2010.

Pangesti Isa.2013. Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. *Accounting Analysis Journal* AAJ 1(3) 2013.

82

Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. Universitas Muhammadiyah Magelang. SNA XIII.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

_____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

_____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ritonga, Irwan. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Roseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. UII, Skripsi.

Sopannah dan Mardiasmo.2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.

Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Widyaningsih aristanti dan Pujirahyu. 2012. Pengaruh pengetahuan anggota legislative daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal media riset akuntansi*, Vol.2.No.1.Februari 2012.

Zainuddin et al. 2002. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

